

IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PRAKTIK *LAND GRABBING* DI DESA WADAS

(Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Wadas dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener)

Ilham Hermansyah

Abstrak

Keberadaan hukum serta berbagai agenda pembangunan dalam kasus di Desa Wadas menjadi bagian dari instrumen kekuasaan yang dapat dilihat sebagai serangkaian mekanisme yang dilakukan untuk melakukan perampasan tanah. Keberadaan hukum tersebut didasari oleh penggunaan Undang-undang Pengadaan Tanah yang menjadi instrumen dalam melakukan agenda pembangunan. Sementara itu, model pembangunan tersebut mewujudkan secara nyata dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam hal ini adalah pembangunan Bendungan Bener. Narasi kepentingan umum menjadi alasan atas segala pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Prosesnya dianggap legal karena cara kerja *land grabbing* merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan beragam model investasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosio-legal yang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan; dan mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum seringkali menjadi alasan untuk melakukan praktik-praktik pembangunan yang destruktif, pengadaan tanah skala luas, dan peminggiran suatu komunitas dari tanahnya/tempat tinggalnya yang pada gilirannya menciptakan perampasan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pertambangan di Desa Wadas yang dilegitimasi dengan berbagai peraturan serta perencanaan pembangunan menegaskan bahwa narasi pembangunan bagi kepentingan umum tidak lebih dari upaya perampasan tanah melalui hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Land Grabbing, Desa Wadas

**LEGAL IMPLICATIONS OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST ON
LAND GRABBING PRACTICES IN WADAS VILLAGE**

*(Case Study of Land Acquisition in Wadas Village in the Development of the Bener Dam
National Strategic Project)*

Ilham Hermansyah

Abstract

The existence of the law and the various development agendas in the case in Wadas Village are part of the instruments of power which can be seen as a series of mechanisms carried out to carry out land grabs. The existence of this law is based on the use of the Land Acquisition Law which is an instrument in carrying out the development agenda. Meanwhile, this development model is manifested in a real way in the National Strategic Project (PSN), which in this case is the construction of the Bener Dam. The public interest narrative is the reason for all development based on the exploitation of natural resources. The process is considered legal because the way land grabbing works is a long chain that is supported by regulations, development plans, and various investment models. This research was conducted using the socio-legal method with two approaches, namely textual studies, articles in laws and regulations, policies; and developing various “new” methods resulting from a marriage between legal and social science methods. The results of this study indicate that development for the public interest is often an excuse for carrying out destructive development practices, large-scale land acquisition, and marginalizing a community from their land/residence which in turn creates the appropriation of community rights. Thus, mining activities in Wadas Village which are legitimized by various regulations and development plans emphasize that the narrative of development for the public interest is nothing more than an attempt to grab land through applicable law.

Keywords: *land acquisition law, land grabbing, wadas village*